

ABSTRAK

Muhammad Dzikri Hakim, 1213030083, 2026: *Implementasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Transit Oriented Development Kereta Cepat dan Sekitarnya Tahun 2023-2043 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Perspektif Siyasah Maliyah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menetapkan kebijakan terkait penataan ruang berupa Kawasan Transit Oriented Development atau dapat disingkat menjadi Kawasan TOD. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya Tahun 2023-2043.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Transit Oriented Development di Wilayah Desa Wanakerta berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2023, 2) mengetahui dampak pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Transit Oriented Development terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Wanakerta, 3) mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Transit Oriented Development terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Wanakerta berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2023.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori, yaitu: 1) teori implementasi kebijakan, 2) teori kesejahteraan sosial, dan 3) teori maslahat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2023, dan literatur terkait, serta studi lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap Dinas PUPR Karawang dan Pemerintah Desa Wanakerta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan TOD di Desa Wanakerta masih berada pada tahap perencanaan dan persiapan, sehingga manfaat belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dampak dari pembangunan yang muncul bersifat potensial, baik dalam peningkatan aksesibilitas, peluang ekonomi, maupun perubahan sosial. Namun, ini juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait alih fungsi lahan dan mata pencaharian. Ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan ini pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kawasan Berorientasi Transit, Rencana Detail Tata Ruang, Kesejahteraan Masyarakat, Siyasah Maliyah